



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KOTA  
PARIAMAN



DIGITAL GOVERNMENT  
**SPBE SUMMIT**  
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**NANIK MURWATI**

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata  
Laksana

NIP. 197208081996032001

# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

## Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

## Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, serta penilaian kunjungan (pada instansi tertentu).

## Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



# EVALUASI

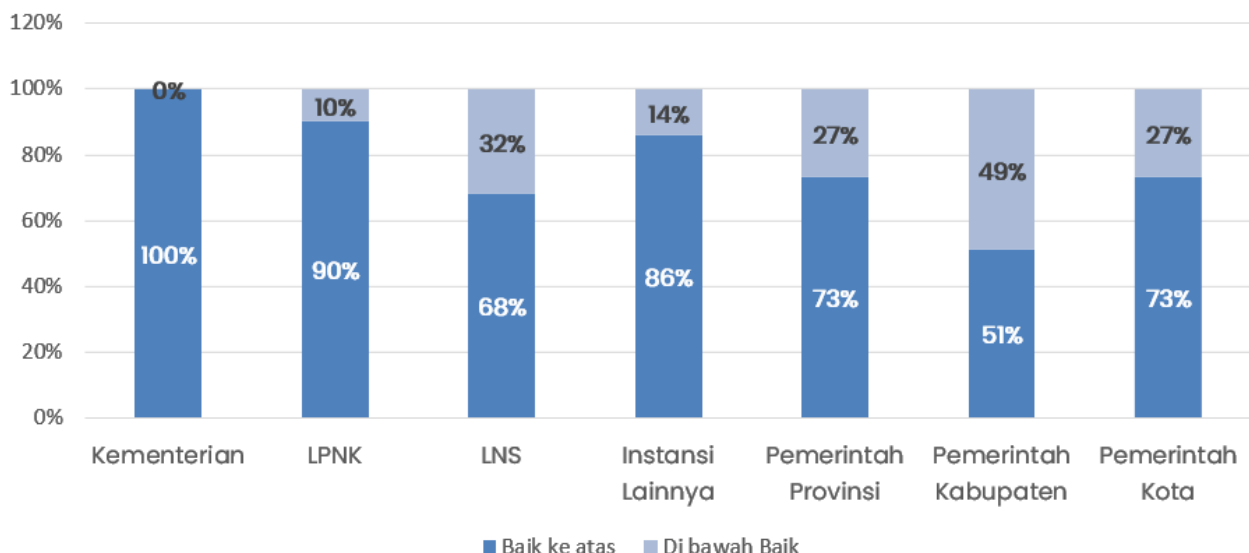
## SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – &lt; 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – &lt; 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – &lt; 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>&lt; 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>			NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS				PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0				Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2				Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5				Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6				Cukup																	
5	< 1,8				Kurang																	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

<sup>\*)</sup> Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

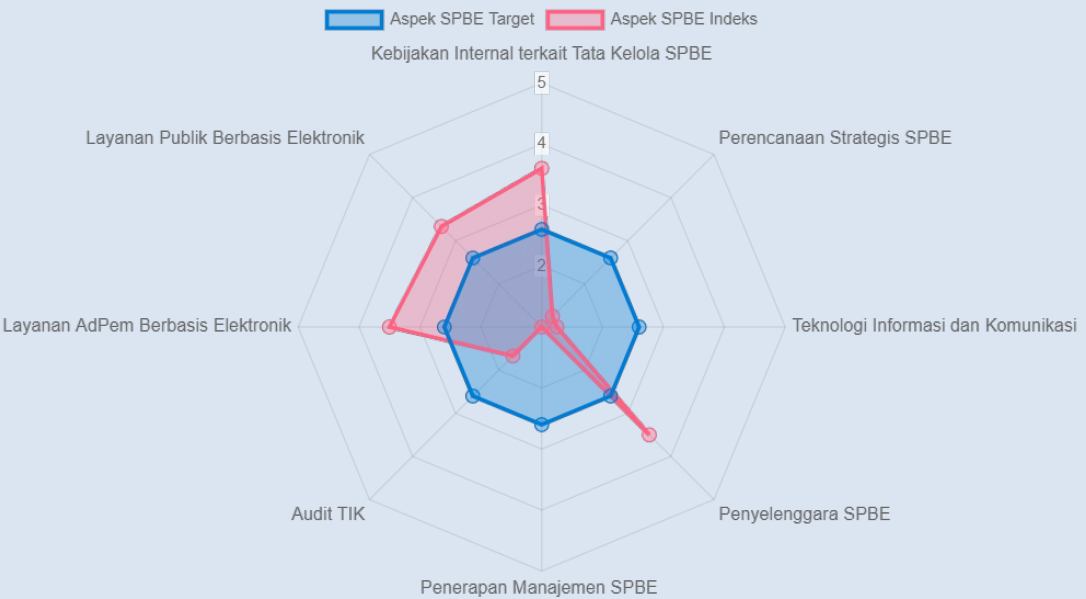
Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	<b>2,79</b>	<b>3,66</b>	<b>3,40</b>	<b>2,95</b>	<b>3,01</b>	<b>2,59</b>	<b>2,50</b>
<b>Domain Kebijakan</b>	<b>2,91</b>	<b>3,63</b>	<b>3,47</b>	<b>3,06</b>	<b>3,17</b>	<b>2,72</b>	<b>3,20</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,27</b>	<b>3,42</b>	<b>3,02</b>	<b>2,66</b>	<b>2,56</b>	<b>2,01</b>	<b>2,54</b>
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
<b>Domain Manajemen</b>	<b>1,65</b>	<b>2,53</b>	<b>2,31</b>	<b>1,98</b>	<b>1,81</b>	<b>1,45</b>	<b>1,82</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,45</b>	<b>4,21</b>	<b>3,99</b>	<b>3,43</b>	<b>3,64</b>	<b>3,28</b>	<b>3,67</b>
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

**Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023**





Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,65
Domain Kebijakan SPBE	3,60
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,60
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Perencanaan Strategis SPBE	1,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,25
Penyelenggara SPBE	3,50
Domain Manajemen SPBE	1,18
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,67
Domain Layanan SPBE	3,43
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,33

## KEKUATAN DAN KELEMAHAN

### A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

9 dari 10 Indikator dalam penerapan aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota (PemKot) Pariaman, yaitu Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana, Manajemen Keamanan Informasi (tingkat kematangan 3) Manajemen Data, Pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, audit TIK (tingkat kematangan 4) Penggunaan Sistem Penghubung layanan (Tingkat kematangan 2) dan Layanan jaringan intra (Tingkat kematangan 5).

- **Kekuatan**  
Terdapat 4 indikator di Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE di PemKot Pariaman adalah: Kebijakan Internal layanan jaringan intra (tingkat kematangan 5) – telah direviu, diberi rekomendasi dan ditindaklanjuti Kebijakan internal Manajemen Data, Pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, audit TIK (tingkat kematangan 4) – sudah direviu.
- **Kelemahan**  
Meskipun aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE PemKot Pariaman ini memiliki score rerata = 3.3, namun terdapat 2 indikator yang menjadi kelemahan, yaitu: kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung layanan (Tingkat kematangan 2) dan tim koordinasi SPBE (tingkat kematangan 1) – tidak ada SK

### B. Perencanaan Strategis SPBE

Terdapat 1 dari 4 indikator di Aspek perencanaan strategis SPBE di PemKot Pariaman telah memenuhi Tingkat kematangan, yaitu indikator 12 Peta rencana SPBE (Tingkat kematangan 2)

- **Kekuatan**  
Pada Aspek perencanaan strategis ini, tidak ada indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di PemKot Pariaman
- **Kelemahan**  
Semua indikator di aspek perencanaan strategis dikategorikan sebagai kelemahan dalam penerapan SPBE di PemKot Pariaman, yaitu: Arsitektur SPBE (Tingkat kematangan 1) dan Peta rencana SPBE (Tingkat kematangan 2), Rencana dan anggaran SPBE – belum dikonsultasikan

### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

PemKot Pariaman telah mampu memenuhi penerapan SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di indikator 15, Pembangunan aplikasi SPBE dengan Tingkat kematangan 2

- **Kekuatan**  
Tidak ada indikator yang menjadi kekuatan PemKot Pariaman pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- **Kelemahan**  
Semua Indikator menjadi kelemahan PemKot Pariaman di aspek Teknologi Informasi

### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan SPBE sudah dipenuhi oleh PemKot Pariaman di indikator 20 – kolaborasi penerapan SPBE dengan tingkat kepentingan 2

- **Kekuatan**  
Pada Aspek penyelenggaraan SPBE, belum ada indikator yang menjadi kekuatan penyelenggaraan SPBE bagi PemKot Pariaman
- **Kelemahan**  
Kedua indikator aspek penyelenggaraan SPBE menjadi kelemahan bagi PemKot Pariaman. Indikator 19 - Tim koordinasi SPBE PemKot Pariaman belum melaksanakan tugasnya (Tingkat kematangan 1), sedangkan indikator 20 - kolaborasi penerapan SPBE (Tingkat kematangan 2) – telah ada PKS antar IPPD namun belum ada dokumentasi kegiatannya.

### E. Penerapan Manajemen SPBE

Tidak ada indikator pada aspek penerapan manajemen SPBE yang dipenuhi oleh PemKot Pariaman, karena belum melaksanakan

- **Kekuatan**

Tidak ada indikator yang menjadi kekuatan dalam aspek penerapan manajemen SPBE di PemKot Pariaman.

- Kelemahan

Semua indikator menjadi kelemahan PemKot Pariaman di aspek penerapan manajemen SPBE ini, yaitu penerapan manajemen resiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen asset TIK, kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE

#### F. Pelaksanaan Audit TIK

Terdapat 2 dari 3 indikator di aspek Audit TIK yang dipenuhi oleh PemKot Pariaman, yaitu indikator 29 pelaksanaan audit infrastruktur dan indikator 30 pelaksanaan audit aplikasi dengan tingkat kematangan 2

- Kekuatan

Tidak ada indikator yang menjadi kekuatan dalam aspek audit TIK di PemKot Pariaman

- Kelemahan

Semua indikator menjadi kelemahan PemKot Pariaman di aspek audit TIK ini, yaitu indikator 29 pelaksanaan audit infrastruktur dan indikator 30 pelaksanaan audit aplikasi - sudah dilaksanakan oleh PemKot Pariaman dengan tingkat kematangan 2 dan indikator 31 pelaksanaan audit keamanan yang belum dilaksanakan

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik telah dipenuhi oleh PemKot Pariaman di semua indikator pada aspek ini, yaitu: layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, dan layanan kepegawaian (Tingkat kematangan 4 – telah berkolaborasi

- Kekuatan

Terdapat 4 dari 10 indikator di Aspek Layanan Administrasi Pemerintah berbasis elektronik ini yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di PemKot Pariaman, meliputi indikator layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, dan layanan kepegawaian. Keempat indikator tsb telah mencapai tahapan pemberian layanan berkolaborasi dengan sistem dan aplikasi SPBE lainnya, seperti Layanan penganggaran dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIPD berkolaborasi dengan aplikasi SIRUP. Selain itu, layanan yang diberikan telah direviu.

- Kelemahan

Tidak ada indikator yang menjadi kelemahan bagi PemKot Pariaman di aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Layanan Publik berbasis elektronik, semua indikator telah dipenuhi oleh PemKot Pariaman, yaitu Layanan Data Terbuka, layanan publik sektoral 2- sistem pelayanan perizinan terintegrasi menggunakan aplikasi online single submission, layanan publik sektoral 3-website kota pariaman (tingkat kematangan 3) Layanan Pengaduan Publik, Layanan JDIH, Layanan Publik Sektoral 1 - aplikasi Dukcapil digimobile dan SIAK (Tingkat kematangan 4)

- Kekuatan

Dalam Aspek Layanan Publik berbasis elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Publik, Layanan JDIH (Tingkat kematangan 4) dan layanan public sektoral 1 – aplikasi Dukcapil digimobile dan SIAK (Tingkat kematangan 4), menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada PemKot Pariaman.

- Kelemahan

Tidak ada indikator yang menjadi kelemahan bagi PemKot Pariaman di aspek layanan publik n berbasis elektronik. test

## REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kota Pariaman. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap PemKot Pariaman sudah dapat menggambarkan predikat CUKUP dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh PemKot Pariaman adalah pada penerapan Aspek Teknologi, Informasi dan Komunikasi Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik dan Layanan Publik berbasis elektronik. Keunggulan penerapan SPBE di PemKot Pariaman tampak dari layanan yang diberikan baik layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik. 7 indikator di aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan kekuatan dengan tingkat kematangan 4 --- SPBE terintegrasi dengan sistem/aplikasi SPBE lainnya dan telah direviu. Sedangkan di aspek layanan publik berbasis elektronik terdapat 3 indikator layanan publik sektoral dengan tingkat kematangan 5 dan 4.

Namun disisi lain, PemKot Pariaman msih cukup banyak kelemahan, khususnya pada aspek perencanaan strategis, Teknologi Industri dan Komunikasi penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE dan audit TIK (semua aspek ini memiliki score dibawah 2). PemKot Pariaman belum melaksanakan penerapan SPBE di aspek penerapan manajemen SPBE dan audit TIK. Sedangkan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, Pemkot Pariaman baru memiliki tingkat kematangan 1 untuk indikator kebijakan internal tim koordinasi SPBE - ketiga indikator masuk dalam kategori lemah. Layanan data terbuka di aspek layanan publik berbasis elektronik baru dalam tahap layanan interaksi. Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang masih lemah bahkan belum mengikuti pedoman, menjadi indikator yang menyebabkan kelemahan penerapan SPBE Pemkot Pariaman lemah di perencanaan strategis

Berdasarkan keunggulan dan kelemahan di semua aspek, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan PemKot Pariaman untuk meningkatkan tingkat kematangan penerapan SPBE-nya: 1) Pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE perlu segera menerbitkan SK tim koordinasi SPBE. 2) Pada aspek perencanaan strategis, PemKot Pariaman perlu menyusun arsitektur SPBE dan memperluas cakupan Peta Rencana SPBE, segera membuat rencana dan anggaran dan inovasi proses bisnis. 3) Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi -- membangun aplikasi mengikuti keseluruhan siklus pembangunan aplikasi segera menjalankan layanan pusat data, layanan jaringan intra dan penggunaan penghubung layanan 4) membentuk tim koordinasi SPBE dan melakukan kolaborasi penerapan SPBE di aspek penyelenggaraan SPBE. 5) perlu segera melakukan semua indikator di aspek penerapan manajemen SPBE. 5) melakukan pelaksanaan audit baik infrastruktur, aplikasi maupun keamanan audit TIK. 4) Pada aspek layanan administrasi pemerintah dan publik, PemKab Pariaman dapat melakukan tindak lanjut dari hasil reviu yang telah dilakukan khususnya untuk indikator dengan tingkat kematangan 4 memikirkan untuk berkolaborasi atau melakukan integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya untuk indikator dengan tingkat kematangan 3 (tiga). 5) meningkatkan layanan yang diberikan menjadi transaksi untuk layanan data terbuka di aspek layanan publik berbasis elektronik



## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3